



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023



**PANGKALAN PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN BATAM**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas terselesainya Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Batam yang merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk menerangkan tingkat pencapaian sasaran atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pencapaian kinerja Triwulan II Tahun 2023 merupakan perkembangan capaian kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja Pangkalan PSDKP Batam melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan serta melakukan perbaikan sistem dan strategi melalui koordinasi secara terus menerus dengan berbagai pihak untuk perbaikan kinerja selanjutnya.

Dengan adanya Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja dan permasalahan di Pangkalan Pengawasan SDKP Batam dalam melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta diharapkan dapat membuka pemikiran lebih kreatif dari berbagai pihak tentang bagaimana meningkatkan peran dan kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Batam.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan tanggung jawab penyelenggaraan Negara tentu saja Laporan ini sangat terbuka terhadap saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan dan perwujudan akuntabilitas publik.

Batam, 10 Juli 2023
Kepala Pangkalan PSDKP Batam



Turman Hardianto Maha

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan PSDKP Batam merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari rencana pada tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja sesuai dengan Renstra 2020-2024. Penyusunan LKj merupakan bentuk pertanggung jawaban Kepala Pangkalan PSDKP Batam kepada Direktur Jenderal PSDKP atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program atau kegiatan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan. Disamping itu juga sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP selama satu tahun anggaran.

Sebagian besar capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) dari masing-masing sasaran strategis Pangkalan PSDKP Batam Tahun pada triwulan II tahun 2023 telah mencapai target yang ditetapkan. Terdapat satu indikator yang tidak mencapai target pada triwulan II tahun 2023 yaitu “**Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas**” dikarenakan terdapat agenda lain yang bersifat penting dari Ibu Riezky Aprilia, S.H.,M.H selaku anggota Komisi IV DPR RI sebagai mitra dalam kegiatan pembinaan POKMASWAS. Untuk itu maka perlu dilakukan penjadwalkan ulang untuk kegiatan pembinaan POKMASWAS dengan anggota Komisi IV DPR RI Ibu Riezky Aprilia, S.H.,M.H. Kemudian untuk indikator yang lainnya sudah mencapai target dikarenakan sebagian besar kegiatan pengawasan dan patrol kapal serta *speedboat* pengawas telah disusun dan direncanakan pada awal tahun, sehingga pelaksanaan

kegiatan pada periode berjalan sudah mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan. Selain itu adanya koordinasi dengan berbagai instansi dan serta pendampingan dari tim Direktorat serta sekretariat Ditjen. PSDKP turut mendukung tercapainya target kinerja Pangkalan PSDKP Batam.

Keberhasilan atau kegagalan atas pencapaian Sasaran Strategis diperoleh berdasarkan hasil pengukuran atas kinerja yang telah dilakukan. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Pangkalan PSDKP Batam triwulan II tahun 2023 sebesar **92,84**.

Alokasi anggaran Pangkalan PSDKP Batam TA. 2023 sebesar Rp. 62.686.869.000,-. Anggaran tersebut terbagi menjadi dua program, yaitu program pengelolaan kelautan dan perikanan serta program dukungan manajemen. Sampai dengan triwulan II tahun 2023 realisasi anggaran sebesar Rp. 20.188.931.064,- atau 32,21%. Apabila disandingkan antara Nilai Kinerja Organisasi sebesar **92,84**.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Isu Aktual Pengawasan SDKP	2
1.4 Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Batam	3
1.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Rencana Strategis 2020-2024 Pangkalan PSDKP Batam	9
2.2 Visi, Misi dan Tujuan Pangkalan PSDKP Batam.....	9
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Pangkalan PSDKP Batam.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
3.1 Capaian Kinerja Organisasi Pangkalan PSDKP Batam	14
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja	17
3.3 Akuntabilitas Keuangan	47
BAB IV PENUTUP	49
5.1 Kesimpulan	49
5.2 Rekomendasi	50
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2023	11
2. Capaian Kinerja Organisasi Pangkalan SDKP Batam Tahun 2023 ..	14
3. Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2023.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Batam.....	5
2. Wilayah Administrasi Pangkalan PSDKP Batam	8
3. Efisiensi Pangkalan PSDKP Batam.....	47

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam (Pangkalan PSDKP Batam) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peran tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui program/kegiatan pengawasan SDKP yang secara garis besar akan dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Pengawasan SDKP 2020-2024.

Pelaksanaan program/kegiatan Pengawasan SDKP hanya dapat terselenggara dengan akuntabel, efektif dan efisien jika diterapkan pengelolaan kinerja organisasi yang baik. Pengelolaan kinerja tersebut secara garis besar mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Aspek-aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan kinerja, dan akan menentukan keberhasilan kinerja organisasi.

Kewajiban suatu organisasi untuk melakukan pengelolaan kinerja telah diatur oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai bentuk implementasi SAKIP tersebut, Pangkalan PSDKP Batam telah melakukan Pengukuran kinerja secara berkala dan melaporkannya secara rutin kepada Direktur Jenderal PSDKP.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan laporan Kinerja yaitu untuk melaporkan capaian program/kegiatan pada tahun 2023 dan sebagai bahan evaluasi atas program/kegiatan yang telah direncanakan apakah sudah sesuai dengan pencapaian yang diharapkan atau masih di bawah dari target kinerja yang sudah ditetapkan.

Tujuan dari penyusunan laporan ini yaitu sebagai Laporan capaian kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Batam Triwulan II Tahun 2023.

1.3 Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya kelautan dan Perikanan

Isu aktual pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah pengawasan Pangkalan PSDKP Batam yang menuntut perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP, antara lain:

1. Bidang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan
 - a. Masih adanya kegiatan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) yang dilakukan oleh Kapal Ikan Asing (KIA);
 - b. Masih adanya Kapal Ikan Indonesia (KII) yang melakukan operasi penangkapan pada wilayah yang tidak sesuai dengan izin;
 - c. Adanya kegiatan penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) ke luar negeri;
 - d. Masih adanya kegiatan pembudidayaan ikan yang tidak sesuai dengan standar Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB); dan
 - e. Masih adanya Importasi hasil perikanan yang tidak sesuai dengan peruntukan.

2. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

- a. Adanya kegiatan pemanfaatan pengelolaan ruang laut yang masih belum memiliki izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL); dan
- b. masih adanya pemanfaatan pulau-pulau kecil tanpa dilengkapi dengan perizinan.

1.4 Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Batam

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 69/PERMEN-KP/2020 tanggal 28 Desember 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pangkalan Pengawasan SDKP Batam merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Pangkalan Pengawasan SDKP Batam menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu :

1. Penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran serta pelaporan dibidang pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas;
4. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan kapal pengawas perikanan;
5. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan

dan perikanan;

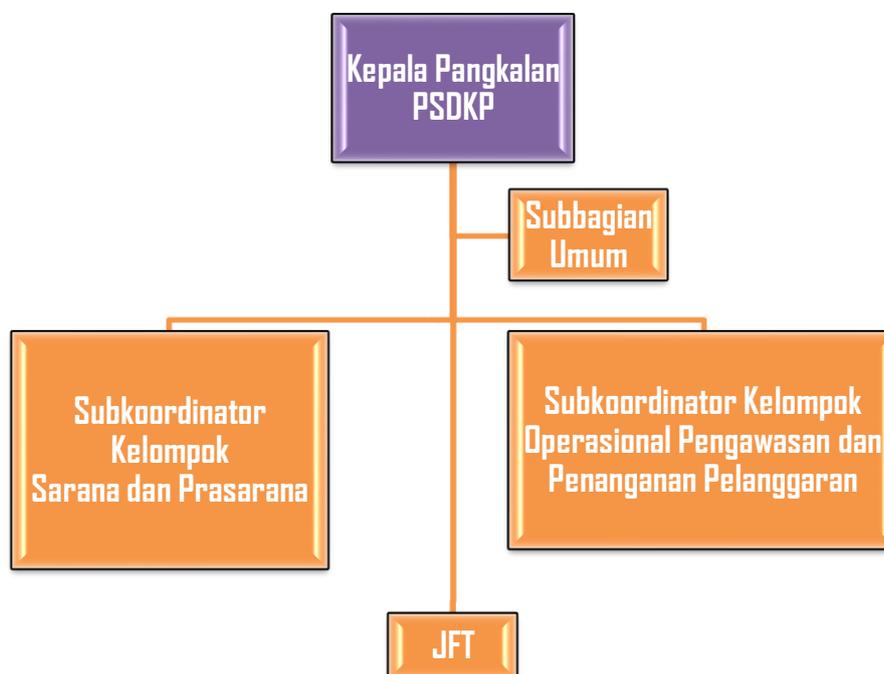
6. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
7. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Kemudian terhadap pelaksanaan tugas pokok tersebut, terdapat beberapa sasaran kegiatan di Pangkalan PSDKP Batam pada tahun 2022, antara lain:

1. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan yang terdiri dari:
 - a. Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Konservasi Perairan;
 - b. Pengawasan Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi;
 - c. Pengawasan Pengelolaan Jasa dan Produk Kelautan;
 - d. Pengawasan Pengelolaan WP3K;
 - e. Pengawasan Pengelolaan Limbah pada Pelaku Usaha Perikanan dan Non Perikanan; dan
 - f. Pengawasan terhadap adanya Kegiatan *Destructive Fishing*;
2. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan yang terdiri dari:
 - a. Pengawasan subsektor penangkapan dan pengangkutan ikan;
 - b. Pengawasan subsektor pembudidayaan ikan; dan
 - c. Pengawasan subsektor pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
3. Operasional Kapal Pengawas HIU 03, HIU MACAN 05 dan HIU 017
4. Operasional 15 *Speedboat/Rigid Inflate Boad/Rubbe Boat/Unit Reaksi Cepat*;
5. Pendampingan POKMASWAS;
6. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang terindikasi melakukan TPP; dan
7. Manajemen urusan Ketata Usahaan

Pangkalan PSDKP Batam di pimpin oleh Kepala Pangkalan yang merupakan

jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator. Kepala Pangkalan membawahi Kepala Subbagian Umum, Subkoordinator Sarana dan Prasarana, Subkoordinator Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran serta Kelompok Jabatan Fungsional dengan total sumber daya manusia yang ada sejumlah 161 pegawai yang terdiri dari 91 PNS dan 70 tenaga kontrak sebagaimana gambar 1 berikut.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Batam

Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing kelompok Lingkup Pangkalan PSDKP Batam diuraikan sebagai berikut:

1. Subbagian Umum

Tugas :

Melaksanakan penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan,

dokumentasi, rumah tangga serta pengelolaan BMN dan perlengkapan di lingkungan Pangkalan PSDKP Batam.

Fungsi :

- a. Penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengumpulan, pengolahan, verifikasi, validasi, dan analisis data, dan pengolahan kinerja, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan, serta penyusunan bahan pimpinan;
- b. Penyiapan perencanaan, pengembangan, disiplin, kesejahteraan, mutasi, tata usaha sumber daya manusia aparatur serta pengelolaan jabatan fungsional tertentu;
- c. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi, tindak lanjut laporan hasil audit, manajemen risiko, dan penyusunan laporan keuangan, penatausahaan, pemanfaatan, penggunaan, penghapusan dan pelaporan barang milik negara, serta layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta urusan tata usaha, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan.

2. Subkoordinator Kelompok Sarana dan Prasarana

Tugas :

Melaksanakan kegiatan hasil dari perumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan dan operasi armada lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawasan dan logistik armada pengawasan dan operasi armada pengawasan;
- b. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawasan

dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
dan

- c. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawas, pengawasan dan logistik armada pengawasan dan operasi armada pengawasan.

3. Subkoordinator Kelompok Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran

Tugas :

Melaksanakan kegiatan hasil dari perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Direktorat Pengawasan maupun Penanganan Pelanggaran, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan maupun penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Batam.

Fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan sumber daya kelautan, sumber daya perikanan dan penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;
- b. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bidang penyelenggaraan pemanfaatan sumber daya kelautan, sumber daya perikanan dan penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan; dan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan sumber daya kelautan, sumber daya perikanan dan penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan.

Pangkalan Pengawasan SDKP Batam dalam melaksanakan tugas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di wilayah Kepulauan Riau, Bangka Belitung Sumatera Selatan dan Jambi membawahi 7 (tujuh) Satuan Pengawasan (Satwas) yaitu Satwas SDKP Tanjung Pinang, Satwas SDKP Natuna, Satwas SDKP Anambas, Satwas SDKP Bangka, Satwas SDKP Belitung, Satwas SDKP Palembang dan

Satwas SDKP Tanjung Jabung Barat. Wilayah administratif Pangkalan Pengawasan SDKP Batam dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Wilayah Adminstratif Pangkalan PSDKP Batam

1.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Batam tahun 2023 diuraikan sebagai berikut :

a) **Bab I Pendahuluan**

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja, isu aktual pengawasan SDKP, serta tugas dan fungsi Pangkalan PSDKP Batam.

b) **Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja**

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Penetapan Kinerja tahun 2023.

c) **Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**

Menguraikan hasil pengukuran kinerja dan keuangan, evaluasi dan analisis capaian kinerja dan keuangan Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2023.

d) **Bab IV Penutup**

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasi perbaikan kinerja ke depan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2020-2024 Pangkalan PSDKP Batam

Rencana Strategis (Renstra) Pangkalan PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan.

Renstra Pangkalan PSDKP Batam pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan SDKP. Dalam implementasinya, Renstra tersebut dijadikan acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan Pangkalan PSDKP Batam dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2020-2024. Kemudian target selama periode renstra 2020-2024 dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

2.2 Visi, Misi dan Tujuan Pangkalan PSDKP Batam

A. Visi

Visi Pangkalan PSDKP Batam 2020 - 2024 adalah "Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab"

B. Misi

Untuk mewujudkan Visi Pangkalan PSDKP Batam 2020 – 2024, maka ditetapkan Misi Pangkalan PSDKP Batam yaitu:

1. Meningkatkan kualitas SDM Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
2. Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;
3. Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab; dan
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Pangkalan PSDKP Batam.

C. Tujuan

Sebagai penjabaran dari visi dan misi Pangkalan PSDKP Batam maka dirumuskan beberapa tujuan, yaitu:

1. Peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
2. Peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan melalui optimalnya pengawasan pengelolaan kawasan konservasi perairan dan optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan lingkup Pangkalan PSDKP Batam.

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Pangkalan PSDKP Batam

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan iktikad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang dalam periode waktu satu tahun, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja; ⁽³⁾ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽⁴⁾ Sebagai dasar penetapan sasaran kinerja, pemberian penghargaan dan sanksi pegawai.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja Pangkalan PSDKP Batam tahun 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja pada periode sebelumnya. Anggaran Pangkalan PSDKP Batam tahun 2023 sebesar Rp. 62.686.869.000,-. Untuk Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2023 setelah disahkan:

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
KEGIATAN 1. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN			
SK1.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	1. Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	80
SK1.2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	2. Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	87,6
		3. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	87,6
SK1.3	Terselenggaranya pembangunan serta	4. Persentase penyelesaian renovasi Bangunan Kantor Satwas SDKP Palembang (persen)	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	5. Persentase penyelesaian perawatan sarana Pengawasan SDKP (persen)	100
KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN			
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan	6. Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan (persen)	100
KEGIATAN 3. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN			
SK3.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan	7. Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan (persen)	100
KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
SK4.1	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan sesuai ketentuan	8. Persentase penganan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (persen)	80
SK4.2	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	9. Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (persen)	93
KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP			
SK5.1	Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP	10. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Batam (indeks)	80
		11. Nilai WBK Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	75
		12. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Batam (persen)	100
		13. Indeks profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (indeks)	78

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		14. Nilai rekonsiliasi kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	90
		15. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Batam yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (persen)	75
		16. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	21
		17. Jumlah inovasi yang dihasilkan Pangkalan PSDKP Batam (inovasi)	1
		18. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (persen)	92
		19. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (persen)	77,5
		20. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (persen)	77,5
		21. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	89
		22. Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	82

Pengukuran tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Manual Indikator Kinerja Utama. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian yang telah diraih dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan Laporan Kinerja yang didukung Aplikasi "**Kinerjaku**" yang merupakan aplikasi khusus berbasis informasi teknologi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi Pangkalan PSDKP Batam

Berdasarkan pengelolaan kinerja pada triwulan II tahun 2023, Capaian Indikator Kinerja Pangkalan PSDKP Batam meliputi 8 Sasaran Strategis (SS) dengan 10 IKU dan 12 IK. Capaian Kinerja Organisasi Pangkalan PSDKP Batam triwulan II tahun 2023 ditabulasikan dibawah ini.

Tabel 3. Capaian Kinerja Organisasi Pangkalan PSDKP Batam triwulan II tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	Triwulan II 2023			
				Target	Capaian	%	
SK1.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	80	50	-	-
SK1.2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	2	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	87,6	87,6	95,65	109,19
		3	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	87,6	87,6	93,76	107,03
SK1.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang	4	Persentase penyelesaian renovasi Bangunan Kantor Satwas SDKP Palembang (persen)	100	-	-	-

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	Triwulan II 2023		
				Target	Capaian	%
	sesuai ketentuan					
		5	Persentase penyelesaian perawatan sarana Pengawasan SDKP (persen)	100	-	-
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan	6	Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan (persen)	100	100	100
SK3.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan	7	Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan (persen)	100	100	100
SK4.1	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan sesuai ketentuan	8	Persentase pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (persen)	80	60	95,24
SK4.2	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	9	Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (persen)	93	50	100
SK5.1	Tata kelola pemerintah yang baik	10	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal	80	80	82,83

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	Triwulan II 2023		
				Target	Capaian	%
	lingkup Ditjen PSDKP	Perikanan lingkup Pangkalan PSKDP Batam (indeks)				
11		Nilai WBK Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	75	-	-	-
12		Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Batam (persen)	100	100	100	100,00
13		Indeks profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (indeks)	78	71	73,48	103,49
14		Nilai rekonsiliasi kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	90	-	-	-
15		Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Batam yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (persen)	75	75	75	100,00
16		Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	21	-	-	-
17		Jumlah inovasi yang dihasilkan Pangkalan PSDKP Batam (inovasi)	1	-	-	-
18		Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup	92	92	92,59	100,64

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	Triwulan II 2023		
				Target	Capaian	%
		Pangkalan PSDKP Batam (persen)				
		19 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (persen)	77,5	-	-	-
		20 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (persen)	77,5	-	-	-
		21 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	89	82	84,23	102,72
		23 Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	82	-	-	-

Analisa dan monitoring yang digunakan pada pencapaian kinerja triwulan II tahun 2023 adalah membandingkan capaian kinerja triwulan II tahun 2023 dengan target yang di tetapkan dalam Rencana Aksi Tahun 2023.

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pada triwulan II Tahun 2023 Pangkalan PSDKP Batam telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Evaluasi dan analisis pada IKU1 diuraikan sebagai **Sasaran Strategis 1 (Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif)** yaitu:

1) Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas

Indikator Kinerja Utama		Target 2023	TW I 2023	Triwulan II 2023			Target 2024
Kode	Uraian			Target	Capaian	%	
IKU1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	80	-	50	0	0,00	90

Target Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas sebesar 80% dan ditetapkan sebagai target semesteran. Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS merupakan sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kualitas terhadap kegiatan pembinaan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kegiatan pembinaan POKMASWAS untuk terciptanya Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat (SIMSWASMAS) secara baik dan efektif. Dalam hal ini, di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan kegiatan pembinaan Pokmaswas dan dituangkan dalam sebuah laporan. Indikator ini menjadi target semesteran yaitu 50 dan tahunan yaitu 80.

Pembinaan POKMASWAS bertujuan untuk pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, konsultasi, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, yang dilakukan melalui pembekalan, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada anggota POKMASWAS guna meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif POKMASWAS dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Komponen penilaian kegiatan pembinaan POKMASWAS antara lain:

- a. Rencana kerja kegiatan pembinaan;
- b. Pendataan keaktifan POKMASWAS; dan
- c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan.

Pada semester I target ini tidak tercapai dikarenakan terdapat agenda lain yang bersifat penting dari Ibu Riezky Aprilia, S.H.,M.H selaku anggota Komisi IV DPR RI sebagai mitra dalam kegiatan pembinaan POKMASWAS. Untuk itu maka perlu dilakukan penjadwalkan ulang untuk kegiatan pembinaan POKMASWAS dengan anggota Komisi IV DPR RI Ibu Riezky Aprilia, S.H.,M.H

Alokasi anggaran untuk pembinaan POKMASWAS pada tahun 2023 sebesar Rp. 150.000.000,- kemudian diadakan revisi menjadi Rp. 109.090.000,- dan sampai dengan triwulan II tahun 2023 sudah terealisasi sebesar Rp. 21.332.068 atau 19,55%.

Evaluasi dan analisis pada IKU2 dan IKU3 diuraikan sebagai **Sasaran Strategis 2 (Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif)** yaitu:

2) Indeks kinerja operasi kapal pengawas

Indikator Kinerja Utama		Target 2023	TW I 2023	Triwulan II 2023			Target 2024
Kode	Uraian			Target	Capaian	%	
IKU2	Indeks kinerja operasi kapal pengawas	87,6	99,69	87,6	95,65	109,19	90

Indeks Kinerja Operasi kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Batam pada triwulan II tahun 2023 adalah 87,6 dan tercapai sebesar 95,65. Tercapaiannya Indikator ini dikarenakan kapal pengawas melakukan kegiatan operasi pengawasan yang sesuai dengan target hari operasi pada triwulan I tahun 2023. Kemudian dalam operasinya, rata-rata dilakukan pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 2 unit per hari operasi. Selain itu jumlah tangkapan dan tindak lanjut terhadap target operasi dilaksanakan dengan sangat baik.

Pada triwulan II tahun 2023 kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Batam telah melaksanakan total 35 hari operasi. Terdapat 262 kapal yang

diperiksa dan terdapat beberapa kapal perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan tidak sesuai dengan ketentuan. Indeks Kinerja Kinerja Operasional Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- a. Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan;
- b. Cakupan wilayah pengawasan;
- c. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR; dan
- d. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Pagu anggaran untuk operasi kapal pengawas sebesar Rp. 20.575.568.000,- yang kemudian direvisi menjadi Rp. 26.860.456.000,- dan sudah terealisasi sebesar Rp. 24.044.267.036,- atau 89,52% dari pagu.

3) Indeks kinerja operasi speedboat pengawas

Indikator Kinerja Utama		Target 2023	TW I 2023	Triwulan II 2023			Target 2024
Kode	Uraian			Target	Capaian	%	
IKU3	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas	87,6	100	87,6	93,76	107,03	90

Indeks Kinerja Operasi Speedboat lingkup Pangkalan PSDKP Batam pada triwulan II tahun 2023 adalah 87,6 dan tercapai sebesar 93,76. Indikator ini mengukur kemajuan operasional speedboat agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Tahun 2023 operasi pengawasan menggunakan *Speedboat/RIB/Rubberboat* pengawas lingkup

Pangkalan PSDKP Batam telah melaksanakan total 135 hari operasi dengan total kapal yang diperiksa sebanyak 144 unit dan lokasi pemantauan/pengintaian terhadap kegiatan penyelundupan *baby lobster* sebanyak 47 lokasi. Tercapaiannya Indikator ini dikarenakan *Speedboat/RIB/Rubberboat* pengawas melakukan kegiatan operasi pengawasan yang sesuai dengan target hari operasi triwulan II. Kemudian dalam operasinya, rata-rata dilakukan pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 1 unit per hari operasi dan 1 lokasi pengintaian. Indeks Kinerja Operasional *Speedboat* Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- 1) Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan;
- 2) Cakupan wilayah pengawasan;
- 3) Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR; dan
- 4) Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Pagu anggaran untuk operasi *speedboat* pengawas pada tahun 2023 sebesar Rp. 2.550.263.000,- dan sampai dengan triwulan II sudah terealisasi sebesar Rp. 814.397.600,- atau 32,15% dari pagu.

Evaluasi dan analisis pada IKU4 dan IKU5 diuraikan sebagai **Sasaran Strategis 3 (Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan)** yaitu:

4) Persentase penyelesaian renovasi Bangunan Kantor Satwas SDKP Palembang

Indikator Kinerja Utama		Target 2023	TW I 2023	Triwulan II 2023			Target 2024
Kode	Uraian			Target	Capaian	%	
IKU4	Persentase penyelesaian renovasi Bangunan Kantor Satwas SDKP Palembang	100	-	-	-	-	-

Persentase penyelesaian renovasi Bangunan Kantor Satwas SDKP Palembang pada tahun 2023 adalah 100 dan menjadi target tahunan. Bangunan ini sebelumnya merupakan bangunan yang digunakan oleh Balai Riset Perikanan Umum dan Penyuluh Perikanan (BRPPUPP). Kemudian pada tanggal 27 Mei 2022 dilaksanakan serah terima bangunan dari Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sesuai BA nomor B.2257/PSDKP.1/PL.510/V/2022.

Selanjutnya bangunan ini direncanakan akan digunakan sebagai Kantor Satwas SDKP Palembang mengingat lokasinya yang strategis. Namun, bangunan tersebut harus dilakukan renovasi terlebih dahulu sebelum bisa digunakan. Karena bangunan ini sudah lama tidak difungsikan oleh pengguna sebelumnya.

Pagu anggaran untuk renovasi bangunan kantor Satwas SDKP Palembang sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan sampai dengan triwulan II masih belum terealisasi. Hal tersebut dikarenakan anggaran pada indikator ini merupakan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk operasi pengawasan menggunakan armada kapal pengawas, sehingga tidak dapat dilaksanakan.

5) Persentase penyelesaian perawatan sarana Pengawasan SDKP

Indikator Kinerja Utama		Target 2023	TW I 2023	Triwulan II 2023			Target 2024
Kode	Uraian			Target	Capaian	%	
IKU5	Persentase penyelesaian perawatan sarana Pengawasan SDKP	100	-	-	-	-	100

Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Batam mendapat target sebesar 100% dan menjadi target tahunan. Perhitungan indikator ini membandingkan jumlah sarana pengawasan yang selesai dirawat dengan target kegiatan perawatan sarana serta prasarana pengawasan. Sarana pengawasan yang dimaksud meliputi kapal pengawas dan *speedboat* pengawas. Perawatan sarana terdiri dari perawatan pencegahan (*preventive maintenance*), perawatan prediktif (*predictive maintenance*), dan perawatan darurat (*breakdown maintenance*) Kapal Pengawas di lingkup PSDKP Batam yang siap operasi yaitu KP. HIU 03, KP. HIU 017 dan KP. HIU MACAN 05. Kemudian untuk *speedboat* pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Batam berjumlah 14 unit. Adapun penyebaran unit *speedboat* adalah sebagai berikut:

1. Napoleon 015 di Satwas SDKP Palembang;
2. Napoleon 016 di Satwas SDKP Natuna;
3. Napoleon 027 di Satwas SDKP Anambas;
4. Napoleon 035 di Satwas SDKP Bangka;
5. Dolpin 015 di Wilker SDKP Tanjung Balai Karimun;
6. Dolpin 018 di Satwas SDKP Tanjung Pinang;
7. Dolpin 023 di Satwas SDKP Batam;
8. Dolpin 024 di Wilker SDKP Moro;

9. Dolpin 008 di Satwas SDKP Belitung;
10. Rubber Boat di Wilker SDKP Sadai;
11. Rigid Inflatable Boat di Pangkalan PSDKP Batam;
12. URC Hiu Biru 01 di Pangkalan PSDKP Batam; dan
13. URC Hiu Biru 02 di Satwas SDKP Tanjung Jabung Barat.

Tujuan indikator ini untuk mengukur sejauhmana kesiapan sarana pengawasan SDKP yang laik operasi dalam mendukung kegiatan operasi pengawasan SDKP. Pagu anggaran tahun 2023 untuk armada pengawasan yang dirawat sebesar Rp. 8.019.600.000,- dan diadakan revisi menjadi Rp. 7.593.210.000,- realisasi anggaran 81,14% atau sebesar Rp. 6.161.444.630,-.

Evaluasi dan analisis pada IKU6 diuraikan sebagai **Sasaran Strategis 4** (***Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan***)

yaitu:

- 8) Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan

Indikator Kinerja Utama		Target 2023	TW I 2023	Triwulan II 2023			Target 2024
Kode	Uraian			Target	Capaian	%	
IKU6	Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan	100	100	100	100	100	100

Capaian Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan pada triwulan II tahun 2023 sebesar 100% dan mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan adanya penambahan dua Polsus WP3K sehingga memaksimalkan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan. Selain itu adanya kegiatan pengawasan instansi terkait juga mendukung pencapaian ini. Dilakukan pengawasan terhadap 6 pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil, 2 pelaku usaha pengawasan ikan dilindungi, 8 pelaku usaha pengawasan pengelolaan

wisata Bahari, 1 pelaku usaha pasir laut, 1 pelaku usaha pengawasan wilayah pesisir, 11 pelaku usaha pengelolaan ruang laut, 1 pelaku usaha pencemaran, 7 pelaku usaha pengelolaan wilayah konservasi dan 3 pelaku usaha Destructive Fishing.

Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan meliputi pelaku usaha pemanfaatan ruang laut (yang memiliki KKPR), pelaku usaha yang tidak menimbulkan pencemaran, pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi, pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi, pelaku usaha jasa kelautan (antara lain : ekstraksi garam, wisata tirta, alse), pelaku usaha pemanfaatan pesisir (reklamasi) dan pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil, pelaku usaha yang memiliki kapal perikanan dibawah 10 GT yang tidak terindikasi melakukan DF (tidak membawa bom, bius, setrum, serta ikan hasil DF).

Presentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan tahun 2023 terbentuk dari beberapa komponen, antara lain:

a) Penangkapan/Pengambilan dan Pengembangbiakan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES

Mencakup kegiatan pengawasan penangkapan/pengambilan, pengembangbiakan/budidaya, perdagangan, penelitian dan pengembangan (termasuk bioteknologi dan biofarmakologi), akuaria, dan pertukaran, dan pemeliharaan untuk kesenangan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES sesuai ketentuan perlindungannya pada taksa pisces, crustacea, mollusca, coelenterata, echinodermata, amphibia, reptilia, algae dan biota perairan lainnya yang hidup di laut, air tawar dan air payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan/peredaran, aquaria, pertukaran dan pemeliharaan untuk kesenangan.

b) Ekstraksi Garam

Kelompok kegiatan mencakup usaha ekstraksi garam yaitu produksi garam dengan pelarutan dan pemompaan, penguapan air laut atau air garam lainnya di tambak/empang/media lainnya, dan/atau penghancuran, pemisahan dan penyulingan garam.

c) Pemanfaatan wilayah pesisir (Reklamasi)

Pelaku usaha yang patuh adalah perorangan/badan yang melakukan usaha dengan memanfaatkan wilayah pesisir atau pulau-pulau kecil. Pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir fokus pada aktivitas reklamasi.

d) Pemanfaatan wilayah pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya oleh PMA dan/atau PMDN

Pengawasan pemanfaatan wilayah pulau-pulau kecil fokus pada kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya dengan status Penanaman Modal Asing (PMA) dan/atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

e) Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL (Pengelolaan BMKT)

Pengelolaan BMKT meliputi pengangkatan dan/atau pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) yang bukan Obyek Diduga Cagar Budaya (ODCB).

f) Wisata tirta lainnya

Suatu usaha pengelolaan wisata bahari yang meliputi kegiatan pembangunan dermaga marina, pendirian resort, ponton wisata, *tracking* mangrove, *dive center/dive operator*, taman bawah air, serta kegiatan wisata tirta lainnya yang memanfaatkan ruang laut secara menetap paling singkat 30 hari.

g) Pemanfaatan Kawasan konservasi perairan

Pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan yaitu setiap orang/badan usaha yang melakukan kegiatan (yang wajib memiliki izin) di dalam kawasan konservasi perairan

h) Pemanfaatan Air Laut Selain Energi

Usaha yang meliputi Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum, Penampungan dan penyaluran air baku atau Aktifitas penunjang treatment air.

i) Pelaku usaha sektor kelautan, perikanan, dan usaha lainnya dalam pencegahan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya

Pelaku usaha adalah perorangan/badan yang melakukan usaha di bidang sektor kelautan, perikanan, dan usaha lainnya. Patuh dalam pencegahan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya.

j) Pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan *destructive fishing*

Kapal perikanan dibawah 10 GT yang diperiksa dan tidak membawa alat/bahan dan/atau hasil tangkapan yang berasosiasi dengan destructive fishing (DF). Destructive fishing adalah kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat/bahan yang merusak (bom ikan/racun ikan/setrum ikan).

k) Pelaku usaha pemanfaatan ruang laut (yang memiliki KKPR)

Parameter :

- Memiliki dokumen KKPR
- Kesesuaian jenis usaha dengan dokumen perizinan

Alokasi anggaran untuk pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.571.938.000,- kemudian diadakan revis menjadi Rp. 782.838.000,-. serta sampai dengan triwulan II sudah terealisasi sebesar Rp. 166.226.221,- atau 21,23%.

Evaluasi dan analisis pada IKU7 diuraikan sebagai **Sasaran Strategis 5** (*Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan*) yaitu:

7) Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan

Indikator Kinerja Utama		Target 2023	TW I 2023	Triwulan II 2023			Target 2024
Kode	Uraian			Target	Capaian	%	
IKU7	Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan	100	100	100	100	100,00	100

Capaian pada triwulan II tahun 2023 adalah 100%, indikator Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan mencapai target dengan presentase 100%. Hal ini dikarenakan kapabilitas pengawas perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Batam meningkat melalui bimtek atau pelatihan. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan bimtek ataupun pelatihan di masing-masing bidang, yaitu pengawasan kapal perikanan, pengawasan budidaya perikanan, pengawasan unit usaha pengolahan ikan dan pengawasan pemasaran hasil perikanan. Pengawasan dilakukan terhadap 20 KBLI pelaku usaha pengawasan rutin berbasis OSS dan 57 KBLI pelaku usaha pengawasan insidental.

Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan terdiri atas pengawasan rutin berbasis OSS dan pengawasan lainnya (pengawasan penangkapan ikan terukur, importasi hasil perikanan, kegiatan budidaya ikan prioritas nasional, dan/atau tindak lanjut aduan masyarakat) yang dilaksanakan secara rutin maupun insidental.

Persentase pelaku usaha perikanan yang diperiksa kepatuhannya tahun 2023 adalah 100% yang terbentuk dari beberapa komponen berikut:

a) Pengawasan Rutin Berbasis OSS

Objek pengawasan rutin berbasis OSS adalah Id proyek pengawasan OSS yang diperoleh dari Pusat. Pengawasan rutin berbasis OSS dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.

b) Pengawasan Penangkapan Ikan Terukur

Pengawasan penangkapan ikan terukur merupakan pemeriksaan kapal perikanan saat keberangkatan dan kedatangan untuk memastikan kesesuaian penangkapan ikan di zona penangkapan ikan terukur. Pengawasan keberangkatan kapal perikanan mengacu pada peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan. Pemeriksaan persyaratan administrative dan kelaikan teknis kapal perikanan saat keberangkatan dibuktikan dengan HPK-B dan/atau SLO melalui e-SLO.

c) Pengawasan Importasi Hasil Perikanan

Objek pengawasan importasi hasil perikanan adalah pelaku usaha yang memiliki Persetujuan Impor/PI tahun 2023 dimana data tersebut diperoleh dari Pusat. Pemeriksaa importasi hasil perikanan dilakukan untuk memeriksa kesesuaian dokumen (**Persetujuan Impor, Surat Pelepasan dan NIB**) terkait pemasukan ikan dan hasil perikanan, jenis, volume ikan atau hasil perikanan, waktu pemasukan serta standar mutu/wajib yang masuk ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan kesesuaian distribusi peruntukan pemasukan hasil perikanan serta mengacu pada peraturan Dirjen PSDKP Nomor 6 tahun 2021

tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan dan .

d) Pengawasan Kegiatan Budidaya Ikan Program Prioritas Nasional

Objek adalah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang berlokasi usaha di kampung budidaya ikan berbasis komoditas dan pengembangan budidaya udang nasional yang ditetapkan. Pengawasan kegiatan budidaya ikan program prioritas nasional dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha dilengkapi dengan perizinan berusaha, lokasi sesuai RTRW/RDTR dan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Cara Budidaya Ikan yang Baik atau Cara Pembenihan Ikan yang Baik dengan mengacu pada peraturan Dirjen PSDKP Nomor 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan. Pengawasan kegiatan budidaya ikan program prioritas nasional dilaksanakan bersama oleh Pengawas Perikanan Pusat dan Pengawas Perikanan Daerah.

e) Pengawasan pengelolaan Komoditas Lobster, Kepiting, dan Rajungan

Objek pengawasan pengelolaan komoditas Lobster, Kepiting, dan Rajungan (LKR) adalah pelaku usaha distribusi komoditas benih bening lobster (*puerelus*), lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp*) lintas provinsi. Pengawasan pengelolaan Komoditas LKR Pengawasan dilaksanakan diluar instalasi karantina ikan dan/atau pengeluaran dengan memeriksa: dokumen perizinan berusaha, jenis dan jumlah komoditas yang akan dilalulintaskan, kondisi komoditas (bertelur atau tidak), kesesuaian ukuran yang ditentukan dan kesesuaian peruntukan.

f) Pengawasan Insidental

Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau sesama pelaku usaha terkait kegiatan usaha perikanan yang disampaikan melalui saluran/kanal resmi KKP/Ditjen PSDKP/UPT PSDKP serta penyisiran pelaku usaha illegal. Teknis pemeriksaan disesuaikan dengan jenis pengawasan yang dilakukan berdasarkan aduan (kegiatan usaha berbasis risiko, kegiatan penangkapan ikan terukur, kegiatan importasi hasil perikanan, kegiatan budidaya perikanan prioritas nasional, dan kegiatan distribusi lintas provinsi komoditas Lobster, Kepiting dan Rajungan.

Pada tahun 2023 pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan dianggarkan sebesar Rp. 1.352.000.000,- kemudian diadakan revisi menjadi Rp. 691.630.000,- dan sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar Rp 363.134.483,- atau 52,50%.

Evaluasi dan analisis pada IKU8 diuraikan sebagai **Sasaran Strategis 6 (Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan sesuai ketentuan)** yaitu:

8) Persentase penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan

Indikator Kinerja Utama		Target 2023	TW I 2023	Triwulan II 2023			Target 2024
Kode	Uraian			Target	Capaian	%	
IKU8	Persentase penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	80	50	60	95,24	120,00	90

Capaian persentase penerapan sanksi administratif Pangkalan PSDKP Batam sebesar 95,24%. Capaian ini merupakan capaian perkembangan yang telah dilaksanakan dalam proses penanganan sanksi administratif berdasarkan PERMEN-KP nomor 31 Tahun 2021 tentang Penerapan Sanksi Administratif di bidang Kelautan

dan Perikanan. Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah rekomendasi pengenaan sanksi administratif dengan jumlah pelanggaran dan sanksi administratif yang sudah ditangani.

Sampai dengan triwulan II tahun 2023, Pangkalan PSDKP Batam telah melaksanakan pengenaan sanksi administratif pada 22 pelaku usaha yang terdiri dari 16 pelaku usaha bidang penangkapan ikan, 6 pelaku usaha bidang pengelolaan ruang laut serta 21 SPKP yang tidak dikenakan sanksi. Total denda yang dikenakan sebesar Rp. 2.188.355.692,- dan sudah dibayarkan menjadi PNBP.

Pangkalan PSDKP Batam tahun 2023 mendapat pagu sebesar Rp 100.000.000,- dan sampai dengan triwulan II sudah terealisasi sebesar Rp. 15.716.252,- atau 15,72%.

Evaluasi dan analisis pada IKU9 diuraikan sebagai **Sasaran Strategis 7 (Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas)** yaitu:

9) Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja Utama		Target 2023	TW I 2023	Triwulan II 2023			Target 2024
Kode	Uraian			Target	Capaian	%	
IKU9	Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	93	40	50	100	120,00	93

Capaian persentase penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan tercapai 100%. Capaian ini merupakan capaian perkembangan yang telah dilaksanakan dalam proses penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan tahapan-tahapan proses penyidikan mulai tahapan gelar perkara awal sampai dengan penyerahan berkas perkara dari PPNS kepada Jaksa

Penuntut Umum (JPU) dengan mengacu kepada Keputusan Dirjen PSDKP Nomor : KEP.372/DJ-PSDKP/2011 perihal Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan. Untuk presentase pada tahap penyelesaian proses penyidikan dihitung 100% apabila proses sudah sampai dengan tahap P-21 tahap II. Pangkalan PSDKP Batam sampai dengan triwulan II tahun 2023 telah menangani 1 kasus TPP yaitu KM. PKFB 350 dan sudah Tahap II.

Pangkalan PSDKP Batam tahun 2023 mendapat pagu sebesar Rp 256.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 71.810.557,- atau 28,03%.

Evaluasi dan analisis pada IKU10, IK11, IK12, IK13, IK14, IK15, IK16, IK17, IK18, IK19, IK20, IK21 dan IK22 diuraikan sebagai **Sasaran Strategis 7 (Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP)** yaitu:

10) Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan

Indikator Kinerja Utama		Target 2023	TW I 2023	Triwulan II 2023			Target 2024
Kode	Uraian			Target	Capaian	%	
IKU10	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan	80	87,62	80	82,83	103,54	85

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Pangkalan PSDKP Batam pada triwulan II tahun 2023 adalah 82,83. Untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna SLO dilakukan survey pada setiap triwulannya. Kegiatan IKM bertujuan untuk mengukur pelayanan terhadap pengguna layanan SLO baik yang ada di UPT Pangkalan PSDKP Batam maupun Satuan Pengawas. Diharapkan terhadap kegiatan ini adalah adanya evaluasi untuk meningkatkan serta meminimalisir kekurangan pada pelayanan yang ada.

Capaian tersebut diperoleh dari 132 responden pengguna layanan baik di UPT, Satwas maupun wilker. Dengan indeks 82,83 menandakan bahwa pelayanan di lingkup Pangkalan PSDKP Batam telah dilaksanakan dengan sangat baik dengan kategori “**B**”. Tentunya hal ini akan menjadi sebuah acuan untuk peningkatan pelayanan di tahun berikutnya.

Pada tahun 2023 pagu anggaran IKM sebesar Rp. 152.008.000.- serta belum terealisasi sampai dengan triwulan II tahun 2023

11) Nilai WBK Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		Target 2023	TW I 2023	Triwulan II 2023			Target 2024
Kode	Uraian			Target	Capaian	%	
IK11	Nilai WBK Pangkalan PSDKP Batam	75	-	-	-	-	75

Target Nilai WBK Pangkalan PSDKP Batam tahun 2023 adalah 75 dan menjadi target tahunan. Tercapainya target ini dikarenakan sistem reformasi birokrasi di Pangkalan PSDKP Batam berjalan dengan baik serta adanya pendampingan dari Sekretariat Ditjen. PSDKP mengenai pemenuhan dan kualitas dokumen WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar komponen penilaian yang meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan PERMEN PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMEN PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan jika dinilai melalui penilaian mandiri berdasarkan Permen KP Nomor: 62/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju

WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Unit kerja yang ditetapkan sebagai Menuju WBK dengan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
3. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0.
4. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.

Pagu anggaran untuk pembangunan zona integritas (ZI) sebesar Rp. 135.758.000,- dan diadakan revisi menjadi Rp. 66.699.000,- belum ada kegiatan sehingga belum terealisasi sampai dengan triwulan II tahun 2023.

12) Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		Target 2023	TW I 2023	Triwulan II 2023			Target 2024
Kode	Uraian			Target	Capaian	%	
IK12	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Batam	100	100	100	100	100,00	100

Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Batam mendapat target 100% dan tercapai. Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.

Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.

Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

Adapun anggaran tahun 2023 untuk Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko sebesar Rp. 45.000.000,- kemudian diadakan revisi menjadi Rp. 22.510.000,- dan sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar Rp. 11.911.623,- atau 11,92%.

13) Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		Target 2023	TW I 2023	Triwulan I 2023			Target 2024
Kode	Uraian			Target	Capaian	%	
IK13	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Batam	78	-	71	73,48	103,49	79

Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Batam tahun 2022 adalah 78 dan ditetapkan sebagai target semesteran. Pada semester I indikator ini telah mencapai target yaitu 73,48 dari target 71. Hal ini dikarenakan pegawai Pangkalan PSDKP Batam semakin banyak yang mengikuti pelatihan dan bimtek sehingga memperoleh sertifikat. Selain itu juga terdapat beberapa pegawai yang telah menyelesaikan tugas belajarnya dan sudah aktif kembali.

Nilai diperoleh dari komponen pembentuk yaitu ⁽¹⁾ Kualifikasi yaitu yang berkenaan dengan tingkat pendidikan ASN sesuai SK Pangkat terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG Online KKP, ⁽²⁾ Kompetensi yaitu yang berkenaan dengan keikutsertaan ASN dalam Diklatpim (bagi Pejabat Eselon) serta Diklat Fungsional, Diklat 20 JP atau Seminar (Bagi ASN Non Eselon), ⁽³⁾ Kinerja yaitu berkenaan dengan hasil penilaian prestasi kerja ASN melalui aplikasi Penilaian Prestasi Kerja Online KKP yang dikolaborasikan dengan database kepegawaian (SIMPEG Online KKP) dan ⁽⁴⁾ Disiplin yaitu berkenaan dengan pernah atau tidaknya ASN dijatuhi hukuman disiplin.

Adapun anggaran tahun 2023 untuk Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Batam yaitu Penyusunan Rencana Kompetensi Pegawai sebesar Rp. 105.000.000,- kemudian diadakan revisi menjadi Rp. 78.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 28.729.611,- atau 36,55%.

14) Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		Target 2023	TW I 2023	2022			Target 2024
Kode	Uraian			Target	Capaian	%	
IK14	Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam	90	-	-	-	-	90

Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam mendapatkan target 90 dan menjadi target tahunan. Rekonsiliasi adalah rangkaian catatan informasi yang menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan informasi. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pangkalan PSDKP Batam adalah 90 dan ditetapkan sebagai target tahunan. Rekonsiliasi kinerja merupakan sebarang verifikasi dalam bentuk proses pencocokan data kinerja dengan catatan informasi terkait pelaporan kinerja. Rekonsiliasi kinerja di lingkungan KKP dinilai dari 3 aspek, yaitu:

a. Aspek kepatuhan

Aspek ini dinilai dari kepatuhan penyiapan dan penyampaian dokumen oleh unit kerja. Nilai kepatuhan diperoleh dari membandingkan dokumen yang tersedia dengan dokumen yang dibutuhkan. Nilai kepatuhan akan bernilai 30 apabila seluruh dokumen yang dibutuhkan tersedia. Untuk dokumen yang dibutuhkan pada aspek kepatuhan, antara lain:

- 1). Perjanjian Kinerja;
- 2). Manual IKU;
- 3). Rincian Target IKU;
- 4). Rencana Akasi;
- 5). LKj/LCK; dan
- 6). Data dukung LKj/LCK.

b. Aspek kesesuaian

Aspek ini dinilai dari kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan. Nilai kesesuaian diperoleh dari membandingkan nilai kriteria dokumen yang disandingkan dengan total dokumen yang disandingkan. Nilai kesesuaian akan bernilai 30 apabila seluruh dokumen yang disandingkan sama dan sesuai. Untuk dokumen yang dibutuhkan pada aspek kesesuaian, yaitu:

➤ Kriteria dokumen yang disandingkan:

1. PK – LKj/LCK;
2. LKj/LCK – Kinerja; dan
3. PK – Kinerja.

➤ Realisasi:

1. LKj/LCK TW I – Kinerja;
2. LKj/LCK TW II – Kinerja; dan
3. LKj/LCK TW III – Kinerja.

➤ Informasi data:

1. Manual IKU – Kinerja; dan
2. Rincian Target IKU – Kinerja

c. Aspek ketercapaian

Aspek ini dinilai dari Pencapaian Kinerja unit kerja (NPSS pada aplikasi kinerja). Nilai ketercapaian diperoleh dari membandingkan Rata-rata NPSS triwulan dibagi dengan 120. Nilai ketercapaian akan bernilai 40 apabila rata-rata NPSS triwulan bernilai maksimal atau 120.

d. Aspek Ketepatan

Nilai ketepatan diperoleh dari ketepatan penyampaian LKj tahunan pada aplikasi e-Sakip Reviu dan penyampaian ke atasan. Nilai ini akan bernilai 100 apabila pengumpulan LKj tahunan tidak melebihi batas waktu penyampaian.

Anggaran untuk rekonsiliasi kinerja pada tahun 2023 sebesar Rp. 15.000.000,- kemudian diadakan revisi menjadi Rp. 13.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 11.692.436,- atau 89,94%.

15) Presentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Batam yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan

Indikator Kinerja Utama		Target 2023	TW I 2023	Triwulan II 2023			Target 2024
Kode	Uraian			Target	Capaian	%	
IK15	Presentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Batam yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	75	75	75	75	100,00	80

Presentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Batam yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan ditargetkan 75% dan tercapai dikarenakan tidak ada temuan. Jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP. Pada tahun 2023 pagu anggaran untuk indikator ini sebesar Rp. 15.000.000,- kemudian diadakan revisi menjadi Rp. 12.500.000,- dan belum ada realisasi.

16) Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		Target 2023	TW I 2023	Triwulan II 2023			Target 2024
Kode	Uraian			Target	Capaian	%	
IK16	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam	21	-	-	-	-	21

Target Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam adalah 21 dan menjadi target tahunan. Tercapainya indikator ini karena terlaksananya serta pemenuhan dokumen dalam budaya kerja. Implementasi program-program budaya yaitu 5 menit sebelum jadwal, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin, upayakan data terkini, organisasikan rapat, catat, aksi, arsipkan, tegakan aturan dengan akuntabel dan transparan, belanjakan anggaran secara realistis, akuntabel dan Amanah, ASN PSDKP produktif kerja, menyelesaikan tugas dengan tepat, hargai, motivasi dan inisiatif, gelorakan Gerakan hemat energi telah diterapkan di Pangkalan PSDKP Batam. Pada tahun 2023 pagu anggaran untuk implementasi program budaya kerja yang dihasilkan yaitu pengelolaan budaya kerja sebesar Rp. 15.000.000,- dan belum terealisasi.

17) Jumlah inovasi yang dihasilkan Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		Target 2023	TW I 2023	Triwulan II 2023			Target 2024
Kode	Uraian			Target	Capaian	%	
IK17	Jumlah inovasi yang dihasilkan Pangkalan PSDKP Batam	1	-	-	-	-	-

Target jumlah inovasi yang dihasilkan Pangkalan PSDKP Batam adalah 1 inovasi dan ditetapkan sebagai target tahunan. Inovasi pelayanan publik adalah terobosan

jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Persyaratan inovasi: memenuhi seluruh kriteria inovasi;selaras dengan tema kompetisi; relevan dengan salah satu kategori kompetisi dan kelompok inovasi, diajukan dalam bentuk proposal dan disertai dokumen pendukung; menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatutan.

Pada tahun 2023 pagu anggaran untuk Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan sebesar Rp 15.000.000,- dan belum terealisasi.

18) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		Target 2023	TW I 2023	Triwulan II 2023			Target 2024
Kode	Uraian			Target	Capaian	%	
IK18	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Batam	92	100	92	92,59	100,64	92

Capaian persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Batam mencapai 92,59%. Optimalnya pencapaian ini karena pegawai *bitrix.24* yang telah *posting* pada halaman berita *bitrix.24*. *Postingan* yang dilakukan yaitu minimal enam kali dan tiga

bulan dengan memperhatikan isi berita yang mengandung 5W+1H. Kemudian seluruh dokumen yang digunakan dalam pengukuran Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar telah terpenuhi seluruhnya.

Diperoleh dari komponen pembentuk yaitu ⁽¹⁾ dokumen yang terdiri dari Renstra 2020-2024, Dokumen Perjanjian Kinerja (Level 3 dan 4), Manual IKU, Rencana Aksi dan Laporan Kinerja. ⁽²⁾ keikutsertaan pada aplikasi *bitrix24* (Level 3 dan 4) dan ⁽³⁾ keaktifan pada aplikasi *bitrix24* (Level 3, 4 dan staf).

Pada tahun 2023 pagu anggaran untuk menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup UPT Pangkalan PSDKP Batam P sebesar Rp 49.500.000,- kemudian diadakan revisi menjadi Rp. 35.900.000,- dan belum terealisasi.

19) Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		Target 2023	TW I 2023	Triwulan II 2023			Target 2024
Kode	Uraian			Target	Capaian	%	
IK19	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Batam	77,5	-	-	-	-	80

Target tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Batam adalah 77,5 dan menjadi target tahunan. Tingkat kepatuhan merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN di Pangkalan PSDKP Batam telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat usulan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) tahun 2020 (bobot 10%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan IV tahun 2020 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) tahun 2017-2019 (bobot 20%);
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2020 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
5. Penyusunan Laporan BMN (Semester dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%);

Pada tahun 2023 pagu tingkat kepatuhan pengelolaan BMN yaitu penyusunan laporan BMN sebesar Rp. 28.000.000,- kemudian diadakan revisi menjadi Rp. 22.450.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.994.782,- atau 48,97%.

20) Tingkat kepatuhan pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		Target 2023	TW I 2023	Triwulan II 2023			Target 2024
Kode	Uraian			Target	Capaian	%	
IK20	Tingkat kepatuhan pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Batam	77,5	-	-	-	-	80

Target tingkat kepatuhan pengadaan Barang/Jasa lingkup Pangkalan PSDKP Batam adalah 75 dan menjadi target tahunan. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku. Tingkat kepatuhan PBJ diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (bobot 20%);
2. Presentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (bobot 30%);
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/jasa (bobot 20%); dan
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (bobot 20%).

Pada tahun 2023 pagu tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa yaitu sebesar Rp. 238.100.000,-. Dan terealisasi sebesar Rp. 125.590.000,- atau 52,75%.

21) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		Target 2023	TW I 2023	Triwulan II 2023			Target 2024
Kode	Uraian			Target	Capaian	%	
IK21	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Pangkalan PSDKP Batam	89	-	82	84,23	102,72	89

Target Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Pangkalan PSDKP Batam adalah 89 dan menjadi target tahunan. Nilai Kinerja pelaksanaan anggaran adalah proses evaluasi dan spending review terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 12 (dua belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada fitur Monev PA aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan. adapun indikatornya yaitu ⁽¹⁾ Revisi DIPA, ⁽²⁾ Deviasi DIPA ⁽³⁾ Pengelolaan UP, ⁽⁴⁾ LPj Bendahara, ⁽⁵⁾ Data Kontrak, ⁽⁶⁾ Penyelesaian Tagihan, ⁽⁷⁾ Penyerapan Anggaran Tahun 2022 ⁽⁸⁾ Retur SP2D, ⁽⁹⁾ Perencanaan Kas, ⁽¹⁰⁾ Pengembalian SPM, ⁽¹¹⁾ Dispensasi SPM dan ⁽¹²⁾ Pagu Minus.

Adapun anggaran tahun 2023 untuk kinerja pelaksanaan anggaran Lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Batam yaitu pelaksanaan pengelolaan anggaran sebesar Rp. 45.000.000,- kemudian diadakan revisi menjadi Rp. 22.510.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 11.911.623,- atau 52,92%.

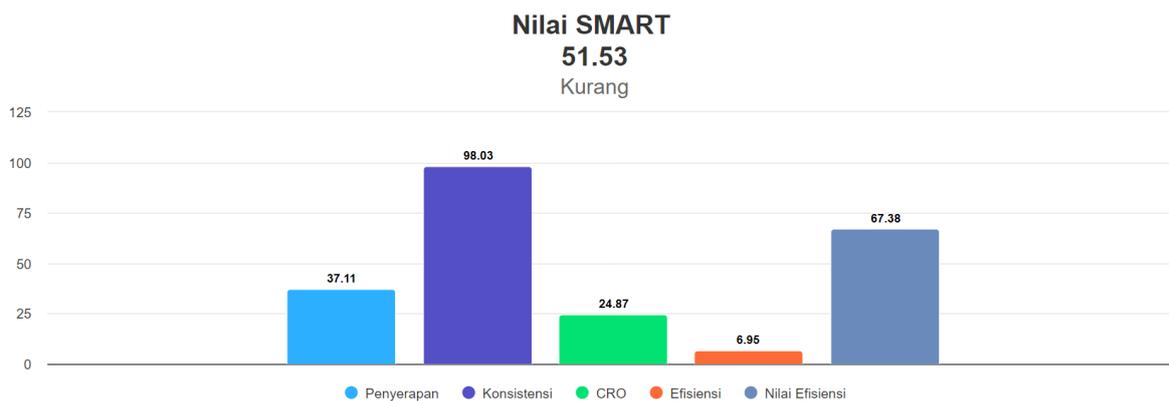
22) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		Target 2023	TW I 2023	Triwulan II 2023			Target 2024
Kode	Uraian			Target	Capaian	%	
IK22	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam	82	-	-	-	-	86

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam mendapat target 82 dan menjadi target tahunan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 capaian output pada bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melebihi dari target yang ditentukan sehingga menambah nilai kinerja anggaran. Indikator ini merupakan proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai ini diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap satuan kerja lingkup KKP kedalam aplikasi SMART Kemenkeu.

Pada tahun 2023 pagu anggaran untuk Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam yaitu sebesar Rp. 15.600.000,- dan belum terealisasi.

Untuk Penghitungan efisiensi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2022 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Hasil dari penghitungan efisiensi penggunaan anggaran menunjukkan penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja Pangkalan PSDKP tahun 2022 terbilang efisien. Adapun rincian hasil perhitungan dapat dilihat pada Gambar 3 berikut.



Gambar 3. Efisiensi Pangkalan PSDKP Batam

Efisiensi penggunaan anggaran Pangkalan PSDKP Batam pada triwulan II tahun 2023 sebesar 6,95. Hal tersebut dikarenakan banyak kegiatan yang sudah dilaksanakan di triwulan II, namun realisasi anggarannya akan diikutkan pada triwulan III tahun 2023. Sebagai bentuk efisiensi dalam penggunaan anggaran, pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagian besar dilakukan pemeriksaan terhadap lebih dari satu pelaku usaha dalam satu surat perintah tugas (SPT) sehingga capaian output dapat mencapai target dengan penggunaan anggaran yang efektif. Selain itu, dalam melaksanakan kegiatan pengawasan kelautan terutama pengawasan pulau-pulau kecil dan Kawasan konservasi, polsus WP3K Pangkalan PSDKP Batam melakukan *onboard* pada kapal pengawas maupun speedboat pada saat unit-unit pengawasan tersebut melakukan operasi. Sehingga hal ini dapat mengefektifkan penggunaan anggaran terutama untuk transportasi perairan.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran Pangkalan PSDKP Batam TA. 2023 sebesar Rp. 62.686.869.000,-. Anggaran tersebut terbagi menjadi dua program, yaitu program pengelolaan kelautan dan perikanan serta program dukungan manajemen. Sampai dengan triwulan II tahun 2023 realisasi anggaran sebesar Rp. 20.188.931.064,-

atau 32,21%. Rincian realisasi anggaran Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2023

No	Kode	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi	
				(Rp)	%
Pengelolaan Kelautan dan Perikanan					
1	2350	Pemantauan dan Operasi Armada	39.154.679.000	10.839.611.120	27,68
2	2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	406.200.000	87.526.809	21,55
3	2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	1.571.938.000	135.044.337	8,59
4	2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	1.352.000.000	326.346.235	24,14
Dukungan Manajemen					
5	2355	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP	20.202.052.000	8.800.402.563	43,56
TOTAL			62.686.869.000	20.188.931.064	32,21

BAB IV PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan PSDKP Batam Tahun triwulan II 2023 menyajikan berbagai keberhasilan capaian strategis Pangkalan PSDKP Batam yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisis dan evaluasi sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.
2. Hasil capaian kinerja sasaran Pangkalan PSDKP Batam sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebagian besar mencapai target yang diperjanjikan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) **92,84**. Hal tersebut tidak terlepas dari perencanaan serta monitoring capaian target yang dilakukan dengan baik oleh Pangkalan PSDKP Batam. Selain itu juga adanya koordinasi maupun pendampingan dari Eselon II lingkup Ditjen. PSDKP.
3. Indikator **Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP** tidak mencapai target yang ditetapkan dikarenakan terdapat agenda lain yang bersifat penting dari Ibu Riezky Aprilia, S.H.,M.H selaku anggota Komisi IV DPR RI sebagai mitra dalam kegiatan pembinaan POKMASWAS sehingga kegiatan pembinaan POKMASWAS akan dijadwalkan ulang.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja Pangkalan PSDKP Batam triwulan II tahun 2023, sebagai upaya peningkatan capaian kinerja pada periode selanjutnya, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti sebagai berikut:

No	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
1	Jadwal pelaksanaan sosialisasi pembinaan POKMASWAS bersama dengan anggota Komisi IV DPR RI masih tentatif	Berkoordinasi dengan Tenaga Ahli (TA) anggota Komisi IV DPR RI tentang pelaksanaan sosialisasi pembinaan POKMASWAS

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAN www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BATAM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Turman Hardianto Maha**

Jabatan : Kepala Pangkalan Pengawasan SDKP Batam

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Adin Nurawaluddin**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Januari 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Adin Nurawaluddin

Pihak Pertama
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam



Turman Hardianto Maha

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BATAM**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
KEGIATAN 1. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN				
SK1.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	1.	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	80
SK1.2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	2.	Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	87,6
		3.	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	87,6
SK1.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	4.	Persentase penyelesaian renovasi Bangunan Kantor Satwas SDKP Palembang (persen)	100
		5.	Persentase penyelesaian perawatan sarana Pengawasan SDKP (persen)	100
KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN				
SK2.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan	6.	Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan (persen)	100
KEGIATAN 3. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN				
SK3.1	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan	7.	Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan (persen)	100
KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
SK4.1	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan sesuai ketentuan	8.	Persentase penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (persen)	80
SK4.2	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	9.	Persentase Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (persen)	93
KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP				
SK5.1	Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP	10.	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Batam (indeks)	80
		11.	Nilai WBK Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	75
		12.	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Batam (persen)	100
		13.	Indeks profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (indeks)	78
		14.	Nilai rekonsiliasi kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	90
15.	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP	75		

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Batam yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (persen)	
		16. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	21
		17. Jumlah inovasi yang dihasilkan Pangkalan PSDKP Batam (inovasi)	1
		18. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (persen)	92
		19. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (persen)	77,5
		20. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (persen)	77,5
		21. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	89
		22. Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	82

Data Anggaran

NO	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
Kegiatan 1	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	1.571.938.000
Kegiatan 2	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	1.352.000.000
Kegiatan 3	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	39.154.679.000
Kegiatan 4	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	406.200.000
Kegiatan 5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	20.202.052.000
Total Anggaran		62.686.869.000

Jakarta, 17 Januari 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Adin Nurawaluddin

Pihak Pertama
Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Batam



Turman Hardianto Maha

REVIU MATRIKS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN PANGKALAN PSDKP BATAM TAHUN 2020-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		TARGET					Keterangan					
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Keterangan
KEGIATAN 1. PEMANTAUAN, OPERASI ARMADA DAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN												
IKU1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	-	-	-	80	90	-	-	-	150.000		IKU Baru
IKU2	Indeks kinerja operasi kapal pengawas	-	-	87,5	87,6	90	-	-	20.575.568	27.434.816		
IKU3	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas			87,5	87,6	90	-	-	2.800.957	2.550.263		
IKU4	Persentase penyelesaian renovasi bangunan Kantor Satwas SDKP Palembang	-	-	-	100	-	-	-	-	1.000.000		IKU Baru
IKU5	Persentase penyelesaian perawatan sarana pengawasan SDKP	-	-	-	100	100	-	-	-	8.019.600		IKU Baru
KEGIATAN 2. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN												
IKU6	Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha kelautan	-	93	93	100	100	-	93	93	1.571.938		
KEGIATAN 3. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN												
IKU7	Persentase penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha perikanan	-	95	100	100	100	406.900	862.000	832.765	1.352.000		
KEGIATAN 4. PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN												
IKU8	Persentase penganan sanksi administrative bidang kelautan dan perikanan	-	-	-	80	90	-	-	-	100.000		IKU Baru
IKU9	Persentase penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan	-	-	-	93	93	-	-	-	256.200		IKU Baru
KEGIATAN 5. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL LINGKUP DITJEN. PSDKP												
IKU10	Indeks Kepuasan	80	80	80	80	85	53.876	38.788	40.058	152.008		

	Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Batam											
IK11	Nilai WBK Pangkalan PSDKP Batam	75	75	75	75	75	24.680	24.680	20.800	135.758		
IK12	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Pangkalan PSDKP Batam	-	-	-	100	100	-	-	-	45.000		IKU Baru
IK13	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Batam	72	73	77	78	79	38.000	53.600	95.000	105.000		
IK14	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Batam	90	90	90	90	90	148.550	165.150	15.600	15.000		
IK15	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Pangkalan PSDKP Batam yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	-	-	70	75	80	-	-	12.500	25.000		
IK16	Nilai implementasi program budaya kerja Lingkup Pangkalan PSDKP Batam	-	-	21	21	21	-	-	3.000	15.000		
IK17	Jumlah inovasi yang dihasilkan Pengakalan PSDKP Batam	-	-	-	1	1	-	-	-	15.000		IKU Baru
IK18	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem	82	84	86	92	93	22.831	17.098	9.400	49.500		

	manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Batam											
IK19	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Pangkalan PSDKP Batam	-	72,5	75	77,5	80	-	47.400	28.000	28.000		
IK20	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Pangkalan PSDKP Batam	-	72,5	75	77,5	80	-	690.000	150.000	238.100		
IK21	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam	88	89	89	89	89	59.000	165.150	29.160	45.000		
IK22	Nilai kinerja anggaran (NKA) lingkup Pangkalan PSDKP Batam	-	86	81	82	86	-	39.572	27.600	15.600		